

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca jatuhnya Pemerintahan Orde Baru tahun 1998, Indonesia masuk pada era Reformasi yang kemudian dikenal sebagai negara ketiga terbesar di dunia yang dikategorikan sebagai negara demokratis. Karakteristik dari sebuah negara demokratis, ialah adanya kebebasan dalam membentuk organisasi partai politik. Seturut dengan hal tersebut, Indonesia tengah mengalami *euphoria* kebebasan politik pasca lengsernya Pemerintahan Orde Baru. Desakan-desakan juga muncul dimasa pemerintahan awal reformasi yang menginginkan agar kehidupan politik Indonesia lebih demokratis sehingga oleh karena itu B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999. Pada awal reformasi jumlah partai politik yang didirikan mencapai 184 partai politik (Romli, 2011, hlm. 200). Sehingga pada era reformasi sistem kepartaian yang dianut Indonesia ialah sistem multipartai. Hal ini membuat partai politik mempunyai pengaruh secara signifikan dalam menentukan calon anggota dewan maupun presiden dan menjadi alat untuk menuju jabatan di tingkat legislatif maupun eksekutif.

Dalam mewujudkan negara yang demokratis tentu saja Indonesia selalu menyelenggarakan pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan tujuan untuk menunjuk wakil rakyat sebagai pelaksana lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Pemilihan umum menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah negara demokrasi karena pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada wakil rakyat yang dipercayai. Sehingga pemilihan umum perlu diselenggarakan secara baik dengan partisipasi rakyat yang luas dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem multipartai di dalamnya tentu saja terdapat berbagai macam partai politik dengan ideologi dan tujuan masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Sejalan dengan pendapat dari Bachtiar (2014, hlm. 9) yang mengungkapkan bahwa “pemilu di Indonesia tidak lepas dari eksistensi partai politik dengan berbagai macam basis ideologi, dari religious, nasionalis bahkan komunis. Eksistensi partai yang beragam tersebut terus ada hingga kini dimana Indonesia menganut sistem multi partai”.

Dengan banyaknya partai politik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia membuat masing-masing partai berusaha mempertahankan kekuatan politiknya sehingga tidak heran jika persaingan antar partai politik semakin ketat. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Sutisna (2016, hlm, 113) bahwa:

Persaingan yang semakin kompetitif dan tak mudah untuk melewatinya dengan memenangi kontestasi itu telah dan tampaknya akan terus mendorong partai politik dan para kandidat untuk mencari dan menggunakan berbagai cara dan strategi yang dibenarkan secara hukum sekaligus dimungkinkan dari sisi ketersediaan sumberdaya yang dimiliki.

Dari hal tersebut tentunya membuat partai politik semakin mengerahkan upaya-upaya demi mendapatkan kepercayaan rakyat karena eksistensi sebuah partai politik dilihat dari bagaimana partai politik tersebut dapat memenangkan suara dalam pemilihan umum. Salah satu partai yang berkembang di Indonesia dan dapat dikatakan mampu mempertahankan kekuatan politiknya hingga sekarang ini, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat menjadi PDI-Perjuangan.

PDI-Perjuangan bukanlah sebuah partai baru di Indonesia, partai ini sebelumnya bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). PDI dideklarasikan sebagai kelanjutan Kelompok Demokrasi Pembangunan. PDI merupakan fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesai (Parkindo), Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Murba. Fusi itu secara resmi dituangkan dalam *Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia*, tanggal 10 Januari 1973. (Swantoro & Suroso, 2019, hlm. 19). Kekuatan utama PDI sejatinya berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 akan tetapi pengaruh PNI meredup setelah jatuhnya Soekarno. PDI jelas sulit bersaing dengan Golkar yang didukung oleh Pemerintahan Orde Baru (Tim Divaro & Tugha, 2014, hlm.102).

Sejak PDI dibentuk, PDI terus-menerus mengalami kemelut intern. Terutama dengan peristiwa yang menimbulkan konflik di kalangan elite kepemimpinan partai yang berasal dari unsur PNI, akibatnya, sejak pemilihan umum 1971 yang pertama pada masa Orde Baru sampai Pemilu 1982 yang ketiga, perolehan suara PDI selalu mengalami penurunan. Pada pemilu 1971 dengan lima partai yang bergabung dalam PDI diperoleh 9,3% dari seluruh jumlah suara pemilih yang sah dan meraih 30 kursi di DPR. Pada pemilu tahun 1977 PDI memperoleh 8,6% suara dan meraih 29 kursi di DPR. Pada pemilu 1982 menjadi 7,9% (Sukamto, dkk, 1991, hlm.1). Pada pemilu 1987,

PDI berhasil memperoleh 10,9% suara dan meraih 40 kursi DPR. Ini suatu peningkatan yang cukup berarti dibandingkan Pemilu 1982 dimana PDI hanya memperoleh 7.9% suara dan 24 kursi di DPR. Kejutan semakin bertambah lagi dalam pemilu 1992, ketika PDI berhasil meningkatkan jumlah perolehan suara menjadi 31% dan meraih 45 kursi di DPR namun pada pemilu tahun 1997 perolehan suaranya menurun drastis, PDI hanya mampu memperoleh 11 kursi di Lembaga DPR yang disebabkan dari perpecahan internal (Chaidar, 1999, hlm. 118). Akibatnya PDI terpecah menjadi dua kubu yaitu PDI yang dipimpin oleh Soerjadi yang mendapat dukungan dari Pemerintahan Orde Baru dan PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri yang mendapat dukungan dari para DPC PDI diberbagai daerah. Adanya tekanan dari politik penguasa Orde Baru membuat PDI-Perjuangan muncul kepermukaan partai politik nasional. Penguasa Orde Baru pada waktu itu mengkhawatirkan popularitas dan pengaruh politik dari Megawati Soekarnoputri (Nainggolan & Wahyu, 2016, hlm. 82).

PDI yang dipimpin oleh Megawati kemudian merubah nama partainya menjadi PDI-Perjuangan. Keberadaan PDI-Perjuangan sebagai partai politik yang mengusung ideologi nasionalis menawarkan pemahaman bagi kondisi perpolitikan di Indonesia, hal tersebut membuat PDI-Perjuangan memiliki basis masa yang cukup kuat secara nasional. PDI-Perjuangan selalu aktif menjadi partai politik yang mengikuti segala jenis pemilihan umum, yakni Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif. Pada Pemilu pertama era Reformasi tahun 1999 PDI-Perjuangan memberi angin segar bagi tumbuhnya kepercayaan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Setidaknya, kemenangan partai berlambang banteng bermoncong putih ini mematahkan asumsi selama ini bahwa suara rakyat bisa dimobilisasi sebagaimana dimasa-masa sebelumnya. PDI-Perjuangan berhasil menarik simpati masyarakat dengan mendominasi perolehan suara di 11 Provinsi (Kumolo, 2015, hlm.112). Setelah pemilu tahun 1999, PDI-Perjuangan mampu menjadi partai besar dalam sejarah perpolitikan Indonesia dengan selalu menjadi urutan yang masuk dalam tiga besar perolehan suara secara nasional dalam pemilihan umum.

Keberadaan partai politik tentunya tidak akan dikenal secara nasional tanpa adanya peran dari daerah-daerah. PDI-Perjuangan menjadi salah satu partai politik yang dapat menyebarkan pengaruhnya di daerah-daerah. Seperti yang di ungkapkan Thaha (2018, hlm. 80) bahwa “PDI-Perjuangan dapat berhasil mempertahankan beberapa provinsi yang menjadi ladang suara sejak pileg 1999 hingga 2014. Setidaknya ada 19 provinsi di Indonesia yang menjadi basis pendukung partai bermoncong putih ini”.

Salah satu daerah yang mendapat pengaruh PDI-Perjuangan ialah Kabupaten Subang. Kabupaten Subang merupakan wilayah yang terletak di sebelah utara provinsi Jawa Barat. Wilayah Kabupaten Subang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat disebelah selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Karawang, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Sumedang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang, 2015, hlm. 3). Sejarah PDI-Perjuangan di Kabupaten Subang tidak lepas dari sejarah nasional. Keberadaan PDI-Perjuangan yang sebelumnya bernama PDI yang akhirnya berubah nama menjadi PDI-Perjuangan pada tanggal 14 Februari 1999, perubahan nama tersebut kemudian diikuti oleh daerah-daerah termasuk Kabupaten Subang, PDI-Perjuangan melakukan seluruh kewajibannya sebagai partai politik (Wawancara dengan Pak Ating Rusnatim, 23 Januari 2019).

Melihat pada Visi dan Misi PDI-Perjuangan secara nasional bahwa PDI Perjuangan memiliki visi mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 serta memiliki misi untuk menghimpun dan membangun kekuatan politik, mewujudkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, budaya secara demokratis, berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan Visi dan Misi PDI-Perjuangan dapat terlihat bahwa PDI-Perjuangan adalah partai politik yang tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga adakah kesesuaian antara Visi dan Misi dan program PDI-Perjuangan di pusat dengan PDI Perjuangan pada tingkat Kabupaten/Kota khususnya di Kabupaten Subang.

Sementara PDI-Perjuangan di Kabupaten Subang memiliki pengaruh yang kuat. Pengaruh kuat PDI-Perjuangan dapat dilihat dari hasil perolehan suara pemilihan umum. Menurut Komarudin & Herdiawanto (2009, hlm.5) yang mengatakan bahwa “di Subang, PDI-Perjuangan memiliki dukungan signifikan dari rakyat yang ditandai dengan perolehan suara PDI-Perjuangan pada pemilu 1999 dan 2004 serta mampu menempatkan kadernya sebagai Ketua DPRD bahkan kader partai berlambang Banteng ini mampu meraih posisi Bupati dan Wakil Bupati”. Pendapat tersebut didukung oleh Eep Hidayat mengatakan bahwa di Kabupaten Subang, PDIP sudah tiga periode (1999,2004, dan 2009) menempatkan ketua DPRD. Kemudian dua periode memenangkan pemilihan umum kepala daerah dengan satu paket pasangan (Tanpa

Nama, 2012). Eksistensi sebuah partai politik dapat dilihat dari perolehan suara partai baik itu dari pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif. Kemenangan yang diraih PDI-Perjuangan bukanlah karena faktor keberuntungan atau kebetulan, melainkan karena usaha-usaha PDI-Perjuangan yang terus melakukan berbagai pendekatan dan program-program yang bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat di daerah Kabupaten Subang.

PDI-Perjuangan terus gencar melakukan sosialisasi dan membangun hubungan baik dengan masyarakat lewat kader-kader PDI-Perjuangan. Kabupaten Subang merupakan daerah yang memiliki slogan “gotong royong”. Kader-kader PDI-Perjuangan melakukan pendekatan gotong royong untuk mendekati masyarakat, dengan pendekatan gotong royong membuat kader-kader PDI-Perjuangan bersatu dengan masyarakat sesungguhnya sehingga terjalin hubungan emosional antara masyarakat dan PDI-Perjuangan (Wawancara dengan Pak Ating Rusnatim, 23 Januari 2019).

PDI-Perjuangan memiliki sayap-sayap partai berupa organisasi-oraganisasi sebagai wadah aspirasi masyarakat, adanya organisasi-organisasi yang dinaungi oleh PDI-Perjuangan di Kabupaten Subang menjadikan PDI-Perjuangan tetap dapat eksis di kalangan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan di Kabupaten Subang tentunya dilakukan dengan kerja keras dan kerjasama yang baik. Kepercayaan masyarakat bisa diraih jika dari dalam partai sendiri mencerminkan kepercayaan dan kerjasama antar pengurus maupun anggota dengan baik. Maka tentunya dilakukan konsolidasi partai agar partai tetap kokoh dan kuat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Subang Tahun 1999-2014” karena beberapa alasan, pertama karena belum adanya buku-buku atau penelitian yang mengkaji tentang PDI-Perjuangan di Kabupaten Subang dari awal perkembangan partai hingga dapat meraih kemenangannya dalam pemilu legislatif. Kedua, peneliti merupakan warga Kabupaten Subang sehingga merasa tergugah untuk melakukan penelitian terkait daerah tempat tinggal penulis. Ketiga, mengenai angka tahun yang diambil oleh peneliti yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, alasan diambil tahun 1999 karena pada tahun 1999 PDI-Perjuangan pertama kali mengikuti Pemilu Legislatif di era Reformasi sehingga menjadi awal tahun perkembangan PDI-Perjuangan sebagai partai politik setelah pergantian nama dari PDI, sementara tahun 2014 menjadi batasan akhir dari penelitian penulis karena di tahun

tersebut PDI-Perjuangan masih tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pemenang pemilu legislatif di Kabupaten Subang. Hal tersebut membuat peneliti merasa perlu mengkaji mengenai upaya PDI-Perjuangan dalam mempertahankan kemenangan pemilu legislatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Subang pada tahun 1999-2014?*”. Untuk lebih memusatkan perhatian pada permasalahan di atas, rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana awal perkembangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Subang tahun 1999?
2. Bagaimana program-program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 1999-2014?
3. Bagaimana strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam meraih kemenangan pemilu legislatif di Kabupaten Subang tahun 1999-2014?
4. Bagaimana dampak kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap perkembangan Kabupaten Subang tahun 1999-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai Eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Subang Tahun 1999-2014. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan awal perkembangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Subang tahun 1999.
2. Mendeskripsikan program-program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 1999-2014.

3. Mendeskripsikan strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam meraih kemenangan pemilu legislatif di Kabupaten Subang tahun 1999-2014.
4. Mendeskripsikan dampak kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap perkembangan di Kabupaten Subang tahun 1999-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai sarana untuk menambah khasanah penulisan sejarah politik lokal dan pengalaman dalam melakukan penelitian.
2. Bagi pemerintah setempat yakni sebagai salah satu dokumentasi pemerintah Kabupaten Subang ataupun dokumentasi bagi PDI Perjuangan Kabupaten Subang
3. Sebagai salah satu rujukan pembelajaran sejarah lokal Kabupaten Subang yang dikembangkan pada kompetensi dasar kelas XII SMA/SMK/MA

3.6 Menganalisis Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi

4.6 Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Penulisan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan penelitian serta alasan peneliti memilih masalah eksistensi partai demokrasi Indonesia perjuangan dalam pemilu legislatif di Kabupaten Subang tahun 1999-2014. Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah untuk memfokuskan permasalahan penelitian yang diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian agar memudahkan peneliti dalam mengkaji permasalahan dan menghindari pembahasan yang terlalu meluas dari topik. Selain itu, dalam bab ini dibahas mengenai tujuan serta manfaat dari penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab II kajian pustaka, dalam bab ini akan menjelaskan mengenai sumber literatur yang digunakan untuk mendukung penulisan terhadap permasalahan yang dikaji oleh penulis. kajian pustaka ini digunakan sebagai kerangka dasar dalam berpikir

oleh penulis untuk menjabarkan hasil-hasil temuan yang ditemukan di lapangan. Kajian pustaka ini akan dipaparkan mengenai konsep-konsep yang relevan dengan penelitian.

Bab III metodologi penelitian, dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari proses mencari sumber-sumber, data-data, pengolahan data, serta tahapan-tahapan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan diantaranya heuristic yaitu proses pengumpulan sumber atau data yang diperlukan dalam pembahasan masalah. Kemudian tahapan kritik yang merupakan proses pengolahan data sejarah yang didapat dalam tahapan heuristik sehingga dapat dipisahkan antara data yang relevan dengan data yang tidak relevan. Selanjutnya interpretasi yaitu penafsiran yang dilakukan oleh penulis terhadap fakta sejarah, konsep serta teori digunakan dengan pendekatan tertentu. Tahapan terakhir yaitu historiografi yang merupakan tahap penulisan data dan informasi yang didapat dan telah melewati kritik, interpretasi dan kemudian disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi.

Bab IV pembahasan. Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian atau isi dari pembahasan mengenai Eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Subang tahun 1999-2014. Penulis memaparkan hasil penelitian secara menyeluruh dalam bentuk uraian deskriptif dengan tujuan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab V Simpulan dan rekomendasi, dalam bab ini berisi mengenai hal-hal pokok yang menjadi pembahasan dari hasil penelitian yang ditemukan penulis dengan kata lain bab ini berisi simpulan atas jawaban dari rumusan masalah.